

REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2021

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN SOSIAL
- 2. VISI** : Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".
- 3. MISI** :
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
 2. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
 3. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
 4. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2021 (RIBU)
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	105.350.222.018,6
05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	143.541.985,0
06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	109.964.434,0
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	27.273.384,0
Total		105.631.001.821,6

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan		104.816.712.480,6
01.01	Indeks Kesejahteraan Sosial	45	
02	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial		235.547.596,0
02.01	Indeks Partisipasi Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	0,684	
02.02	Persentase (%) SDM Kesos yang terserifikasi (ASN & non ASN)	25%	
02.03	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	30%	
02.04	Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	68,1%	
03	Meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)		574.694.899,0
03.01	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan	50%	
04	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik		1.259.530.786,0
04.01	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial	95	
Total			106.886.485.761,6

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2022	2023	2024
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
027.DQ	Program Perlindungan Sosial	105.579.778.130,6	0,0	0,0	0,0	0,0	20.816.118,0	2.084.999,0	0,0	0,0	0,0	105.602.679.247,6	114.370.440.449,5	114.553.040.231,0	114.772.428.199,0
027.WA	Program Dukungan Manajemen	1.275.202.007,0	0,0	0,0	0,0	2.838.000,0	0,0	5.766.507,0	0,0	0,0	0,0	1.283.806.514,0	1.715.730.171,7	1.940.075.278,2	2.283.204.773,5

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2022	2023	2024
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
	Total	106.854.980.137,6	0,0	0,0	0,0	2.838.000,0	20.816.118,0	7.851.506,0	0,0	0,0	0,0	106.886.485.761,6	116.086.170.621,2	116.493.115.509,2	117.055.632.972,5

Jakarta, 01 Desember 2021
 SEKRETARIS JENDERAL

Harry Hikmat
 NIP. 196307091988031002